

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Bab ini menguraikan landasan teori yang menjadi dasar konseptual penelitian. Dengan adanya landasan teori ini, diharapkan nantinya akan memperjelas kerangka pemikiran dalam menganalisis peran perpustakaan jalanan terhadap literasi masyarakat marjinal.

2.1.1 Peran

Peran seringkali dikaitkan dengan bagaimana seseorang menjalani tugasnya di posisi dan kedudukan tertentu, atau bagaimana seorang aktor mendalami pekerjaannya dalam sebuah drama, namun pengertian peran dalam penelitian ini akan mengadaptasi beberapa pendapat ahli dan beberapa sumber terpercaya. menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2025), peran merupakan perangkat tingkatan yang diharapkan yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Soerjono Soekanto (2002) berpendapat bahwa peran adalah komponen dinamis dari sebuah kedudukan. Di mana jika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban dari kedudukannya dengan baik, maka ia dikatakan menjalankan sebuah peran. Soekanto (2002) juga mengelompokkan peran menjadi tiga jenis yaitu;

1. Peran yang diharapkan, 2. Peran yang dilaksanakan, 3. Peran yang dipelajari. Peran yang diharapkan merupakan perilaku ideal yang diharapkan oleh masyarakat dari sebuah kedudukan, cocok untuk diadaptasi kedalam penelitian ini, karena dapat menjelaskan bagaimana peran ruang publik inklusif dalam literasi masyarakat marjinal di lapak baca “Perpustakaan Jalanan Jakarta” Blok M. Sedangkan definisi peran menurut Biddle & Thomas (1996) adalah harapan sosial yang ditujukan kepada seorang yang menjabat posisi tertentu dalam sebuah sistem sosial, di mana dengan adanya individu atau lembaga yang memiliki posisi tertentu dalam masyarakat, menciptakan harapan sosial yang berasal dari masyarakat atau kelompok sosial tertentu.

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat menarik kesimpulan bahwa peran merupakan fungsi, tanggung jawab, dan perilaku yang dilaksanakan oleh individu atau sebuah lembaga sesuai dengan posisi kedudukannya dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, peran didefinisikan sebagai sebuah bentuk pelaksanaan fungsi sosial yang dilaksanakan oleh perpustakaan jalanan sebagai ruang publik inklusif dalam memenuhi harapan masyarakat untuk meningkatkan literasi pada masyarakat marjinal.

2.1.2 Ruang Publik Inklusif

Ruang publik merupakan ruang yang mementingkan fungsi sosial dengan menjawab kebutuhan dan kegiatan sehari-hari penggunanya, kualitas ruang publik dapat dilihat dari sejauh mana ruang tersebut dapat memenuhi kebutuhan penggunanya (Carr et al., 1992). Carr menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah ruang publik jika mampu memenuhi lima dasar kebutuhan pengguna, yaitu kenyamanan (*comfort*), relaksasi

(*relaxation*), keterlibatan pasif (*passive engagement*), keterlibatan aktif (*active engagement*), dan penemuan (*discovery*) (Carr et al., 1992).

Kenyamanan (*comfort*) merupakan point utama dalam kebutuhan dasar ruang publik, karena menentukan apakah pengguna bersedia untuk hadir, menetap, dan beraktivitas di ruang publik (Carr et al., 1992). Kemudian, relaksasi (*relaxation*) bagaimana ruang publik dapat memberikan rasa tenang dan kesempatan bagi penggunanya untuk melepaskan penat dari aktivitas sehari-hari (Carr et al., 1992). Carr (1992) juga menjelaskan bahwa ruang publik juga memungkinkan untuk pengguna terlibat secara pasif (*passive engagement*), di mana individu dapat menikmati suasana dan mengamati aktivitas tanpa terlibat secara langsung (Carr et al., 1992).

Selain terlibat secara pasif, ruang publik juga harus mendukung keterlibatan aktif antar pengguna seperti diskusi dan aktivitas bersama, (Carr et al., 1992). Ruang publik juga harus mendukung penemuan baru dan pengalaman pengguna di ruang publik (*discovery*), yang mendorong ketertarikan untuk mengunjungi kembali (Carr et al., 1992), dengan demikian ruang publik berfungsi secara fisik sekaligus menjadi ruang pengalaman sosial yang dinamis bagi masyarakat.

Ruang publik yang dimaksud oleh Carr et al. (1992) merupakan ruang fisik yang berada di daerah perkotaan yang dapat diakses oleh masyarakat dan memungkinkan terjadinya aktivitas sehari-hari dan interaksi sosial, dapat berupa taman, jalan, plaza, trotoar, dan ruang publik lainnya yang dapat menjadi tempat bertemu dan beraktivitas sosial.

Berbeda dengan Carr et al. (1992) yang menekankan aspek fisik dan keterlibatan pengguna, Habermas (1989) mendefinisikan ruang publik sebagai tempat berkumpul masyarakat, di mana masyarakat dapat berdiskusi dan membentuk opini publik secara rasional yang dapat mengkritisi pemerintah dan negara, sehingga ruang publik juga berfungsi sebagai perantara antara masyarakat dan negara.

Meskipun Carr et al. (1992) dan Habermas (1989) tidak menggunakan kalimat inklusif secara tertulis dalam konsep ruang publik miliknya, namun ia menekankan pada pemenuhan seluruh kebutuhan pengguna yaitu masyarakat luas. Ruang publik inklusif dijelaskan lebih rinci oleh Zhou (2019) pada laporan penelitiannya, Zhou (2019) mengungkapkan bahwa ruang publik inklusif merupakan ruang yang dapat memberikan rasa aman, diterima, dan dihargai bagi seluruh masyarakat dengan latar belakang apapun, sehingga masyarakat dapat mengakses, menggunakan, dan memaknai ruang tanpa adanya diskriminasi.

“an inclusive public space is often seen as a ‘public space for all’. It suggests that everyone should feel welcomed, included and not discriminated against by their gender, age, sexuality, race, ethnicity, religion, cultural background, socioeconomic status and/or personal values when being in a public space”

Zhou (2019) berpendapat bahwa ruang dapat dikatakan inklusif tidak hanya meliputi akses secara fisik tetapi juga meliputi pemahaman tentang bagaimana pengalaman pengguna, relasi sosial, dan proses pengelolaan ruang, dengan fungsinya yang sangat krusial menjadikan ruang publik inklusif penting keberadaannya,

khususnya bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap ruang komersial.

“inclusive public space is particularly significant for marginalized and underserved neighborhood and populations as they often do not have equal access to other paid services and commodified space in the city”.

Sedangkan PBB melalui UN-Habitat (2016) mendefinisikan ruang publik inklusif sebagai ruang yang dimiliki dan digunakan bersama, yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat secara gratis tanpa memungut keuntungan apapun, dan dapat menggambarkan keberagaman serta identitas masyarakat.

“public space are all places publicly owned or public use, accessible and enjoyable by all for free and without a profit motive. Public space are key element of individual and social well-being, the places of community’s collective life, expressions of the diversity if their common, natural and cultural richness and a foundation of their identity”.

UN-Habitat (2016) juga menegaskan bahwa inklusivitas sebuah ruang publik merupakan sebuah hak yang wajib bagi negara atau kota menjamin aksesnya secara setara, dengan prinsip ruang publik harus inklusif secara sosial, terintegrasi dan tersambung dengan lingkungan kota, memiliki akses yang mudah, memberikan rasa aman, dan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, inklusivitas ruang publik dipahami berdasarkan pemikiran Zhou (2019) dan UN-Habitat (2016), yaitu ruang yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, dapat diakses tanpa hambatan administratif maupun sosial, memberikan rasa diterima dan aman bagi penggunanya, serta memungkinkan partisipasi kelompok masyarakat marjinal secara setara. Indikator tersebut digunakan sebagai landasan untuk menganalisis lapak baca “Perpustakaan Jalanan Jakarta” sebagai ruang publik inklusif.

Dapat dipahami dari beragamnya pemahaman di atas, bahwa ruang publik inklusif adalah ruang yang mementingkan fungsi sosial dengan visi memenuhi kebutuhan pengguna secara setara dan adil. Keberhasilan sebuah ruang publik dilihat oleh terpenuhinya kebutuhan dan pengalaman pengguna (Carr et al., 1992), tanpa adanya diskriminasi melalui relasi sosial yang inklusif khususnya bagi masyarakat marjinal (Zhou, 2019), serta jaminan akses yang setara terhadap ruang milik bersama yang aman dan berkelanjutan oleh kota dan negara (UN-Habitat, 2016).

Berdasarkan pemikiran Zhou (2019), inklusivitas ruang publik dapat dipahami melalui tiga aspek utama, yaitu masyarakat merasa diterima (*welcomed*), dilibatkan (*included*), dan tidak mengalami diskriminasi (*non-discrimination*) ketika menggunakan ruang publik. Ketiga aspek tersebut digunakan sebagai landasan dalam menganalisis tingkat inklusivitas lapak baca "Perpustakaan Jalanan Jakarta" pada penelitian ini.

Dalam penelitian ini menggunakan konsep ruang publik inklusif milik Zhou (2019) sebagai landasan teori utama, karena secara langsung membahas inklusivitas

ruang publik dalam konteks pengalaman pengguna, relasi sosial, dan akses bagi masyarakat marjinal.

Pemahaman milik Carr (1992) digunakan untuk memahami kualitas ruang publik, sementara Habermas (1989) digunakan sebagai sudut pandang kritis untuk melihat keterbatasan ruang publik dalam konteks negara. Konsep ruang publik inklusif kemudian dijelaskan secara lebih spesifik oleh Zhou (2019) dan UN-Habitat (2016) sebagai penguatnya yang menekankan inklusivitas sebagai hak masyarakat dan tanggung jawab negara.

2.1.3 Peran Ruang Publik Inklusif

Ruang publik inklusif sangat memiliki peran penting dalam kehidupan kota, khususnya bagi masyarakat marjinal, dengan terjaminnya akses, rasa aman, dan partisipasi tanpa adanya diskriminasi. Menurut Zhou (2019), ruang publik inklusif memiliki peran utama yaitu menjamin inklusi sosial dengan meyakinkan semua masyarakat, termasuk masyarakat marjinal dapat hadir dan merasa diterima tanpa adanya diskriminasi.

“an inclusive public space is often seen as a ‘public space for all’. It suggest that everyone should feel welcomed, included and not discriminated against by their gender, age, sexuality, race, ethnicity, religion, cultural background, socioeconomic status and/or personal values when being in a public space”

Peran ruang publik inklusif lainnya menurut Zhou (2019) yaitu menjadi wadah untuk berkumpul, belajar, dan bebas untuk berekspresi, khususnya bagi masyarakat marjinal yang tidak memiliki akses terhadap ruang komersial. Zhou juga menjelaskan

bahwa ruang publik inklusif perannya harus terus diperbaharui karena menjadi arena pembelajaran sosial melalui pengalaman pengguna, relasi sosial, dan pengelolaan ruang.

“inclusive public space is particularly significant for marginalized and underserved neighborhoods and population as they often do not have equal access to other paid services and commodified spaces in the city”

Sejalan dengan Zhou, UN-Habitat (2016) menekankan bahwa ruang publik inklusif berperan sebagai ruang kehidupan bersama masyarakat kota, di mana masyarakat dapat berinteraksi, bertemu dengan kelompok sosial lainnya, dan meningkatkan kepedulian sosial.

“public space are key element of individual and social well being, the places of a community’s collective life, expressions of the diversity of their common, natural and cultural richness”

UN-Habitat (2016) juga mempertegas bahwa ruang publik inklusif ikut berperan dalam mendukung pembelajaran non-formal, pertukaran pengetahuan, aktivitas ekonomi dan aktivitas literasi masyarakat, yang dijamin aksesnya setara oleh negara atau pemerintah kota, karena ruang publik inklusif merupakan hak warga kota yang wajib dipenuhi.

Sedangkan Widyawati et al. (2011) mengungkapkan bahwa peran ruang publik inklusif mencakup meningkatkan solidaritas antar masyarakat yang terbentuk karena

adanya interaksi secara rutin, menumbuhkan kepedulian terhadap sesama individu dan sekitar termasuk lingkungan, mengurangi gaya hidup individualistik pada masyarakat, serta menjadi penanda kualitas kehidupan masyarakat disekitarnya.

Menurut Attia & Ibrahim (2017) peran ruang publik inklusif adalah sebagai agen perubahan sosial dan spasial, dengan peran utama meliputi menjadi jembatan antara kawasan informal dengan kawasan kota yang formal bagi kelompok yang terpinggirkan, menjadi ruang yang mewadahi interaksi sosial dan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup dengan mempertimbangkan aksesibilitas, keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan, khususnya bagi kelompok rentan, mendorong partisipasi masyarakat sebagai bentuk kebutuhan yang membangun identitas lokal, dan sebagai agen perubahan sosial yang dapat mengubah pandangan terhadap kawasan informal yang tadinya sebuah “masalah” menjadi sebuah potensi.

Gvozdkova et al. (2020) menegaskan bahwa peran ruang publik inklusif meliputi dapat memfasilitasi interaksi antar budaya pada masyarakat, menjadi ruang bebas ekspresi budaya bagi masyarakat, sebagai ruang yang mendukung pendidikan informal, mewujudkan dan menjadi bentuk keadilan atas spasial, hak atas kota, dan keberhasilan integrasi sosial.

Dapat disimpulkan dari beragamnya pemahaman di atas, ruang publik inklusif berperan penting dalam menjamin akses, memberikan rasa aman, dan partisipasi sosial tanpa adanya diskriminasi, khususnya bagi kelompok masyarakat marjinal. Zhou (2019) menegaskan bahwa ruang publik inklusif berfungsi sebagai sarana inklusi sosial yang memungkinkan masyarakat hadir, merasa diterima, serta berkumpul, belajar, dan

berekspresi secara setara, sementara UN-Habitat (2016) memandang ruang publik inklusif sebagai ruang kehidupan bersama yang merupakan hak warga kota dan berperan dalam mendorong interaksi sosial, pembelajaran non-formal, literasi, dan kesejahteraan sosial.

2.1.4 Perpustakaan Jalanan

Chen (2022) mendefinisikan perpustakaan jalanan sebagai ruang publik berbasis komunitas yang memungkinkan masyarakat untuk mengambil, membaca, dan meninggalkan buku secara bebas tanpa ada aturan formal. Chen (2022) mengatakan bahwa fungsi perpustakaan jalanan tidak hanya sebagai tempat menyimpan buku, tetapi menjadi mekanisme sosial yang memperkuat hubungan dan rasa kepemilikan dalam masyarakat melalui literasi.

Ahmad dan Paul (2022) dalam penelitiannya, mereka mendefinisikan perpustakaan jalanan sebagai perpustakaan informal yang berada di ruang publik terbuka, di mana masyarakat dapat mengambil, membaca, dan mengembalikan buku tanpa ada batas pengembalian, dengan tujuan memberikan akses buku secara gratis bagi anak-anak dan masyarakat yang tidak mampu membeli buku, menumbuhkan kebiasaan membaca masyarakat, menjadi ruang wisata edukasi di tempat publik seperti taman, stasiun, dan halte, menjadi wadah penyebaran informasi secara inklusif. Menurut Ahmad dan Paul (2022), perpustakaan jalanan memiliki banyak kelebihan yang meliputi biaya pemeliharaan yang rendah, tidak terdapat peraturan ketat seperti di perpustakaan umum, akses gratis bagi seluruh kalangan masyarakat, fleksibel,

memberikan kesempatan bagi masyarakat marjinal dan tunawisma untuk tetap membaca.

Menurut Kurniawan dan Pratiwi (2025) dalam penelitiannya, perpustakaan jalanan merupakan perpustakaan alternatif berbasis komunitas yang berada di ruang publik terbuka (jalan, taman, ruang terbuka lainnya), dengan fokus pada kegiatan membaca dan menyediakan akses buku secara sederhana, minim biaya, dan inklusif, tanpa adanya aturan hierarkis layaknya perpustakaan formal. Tujuan perpustakaan jalanan menurut Kurniawan dan Pratiwi (2025) adalah sebagai wadah menumbuhkan budaya literasi di masyarakat.

Dalam penelitiannya, Mukadar dan Candrasari (2024) mendefinisikan perpustakaan jalanan sebagai wadah literasi alternatif berbasis komunitas yang tumbuh dari kesadaran dan inisiatif masyarakat, yang menyediakan akses baca secara terbuka, gratis, dan partisipatif serta berada di ruang publik terbuka. Fungsi perpustakaan jalanan menurut Mukadar dan Candrasari (2024) yaitu sebagai wadah peningkatan kemampuan masyarakat khususnya bagi masyarakat marjinal yang sulit menjangkau perpustakaan formal dan memastikan seluruh masyarakat dapat menerima haknya dalam literasi, membaca, dan mengakses informasi kapan saja dan di mana saja, tanpa adanya batasan.

Berdasarkan kumpulan pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan jalanan merupakan perpustakaan alternatif berbasis komunitas yang berada di ruang publik terbuka dan menyediakan akses buku secara gratis, bebas, dan tanpa adanya aturan formal yang kaku. Fungsi perpustakaan jalanan meliputi tempat

membaca, ruang sosial yang inklusif dan partisipatif. Dengan tujuan untuk memperluas akses literasi, menumbuhkan budaya baca, serta menjamin seluruh masyarakat khususnya masyarakat marjinal mendapatkan haknya dalam mengakses informasi secara setara.

Konsep perpustakaan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk ruang yang berpotensi menjembatani fungsi ruang publik inklusif dengan aktivitas literasi masyarakat. Aabø & Audunson (2012) mendefinisikan perpustakaan sebagai *Low Intensive Meeting places* yang di mana memungkinkan individu dapat bertemu lintas kelompok sosial. Menurut Aabø & Audunson, Perpustakaan menjalankan fungsi bukan hanya sebagai penyedia koleksi tetapi juga sebagai *meeting place* yang dapat menjadi

1. Ruang netral yang terbuka bagi seluruh kalangan masyarakat tanpa membedakan status sosial, ekonomi, ataupun latar belakang.
2. Mengurangi kesenjangan sosial. karena bersifat gratis dan inklusif, perpustakaan diharapkan memberikan untuk berinteraksi antar kelompok yang nantinya dapat menumbuhkan *Bridging Social Capital*.
3. Mendukung partisipasi sosial dengan menyediakan ruang diskusi, acara komunitas, hingga forum publik.
4. Membangun identitas komunitas.

Konsep *Library as Meeting Place* milik (Aabø & Audunson, 2012) digunakan untuk mendefinisikan fenomena lapak baca “Perpustakaan Jalanan Jakarta” di kawasan Blok M. Lapak baca “Perpustakaan Jalanan Jakarta” bukan hanya sebagai penyedia ruang publik yang terbuka dan netral, tetapi juga menyediakan akses informasi serta menjadi *low intensive meeting place* untuk masyarakat dengan berbagai latar belakang, termasuk masyarakat marjinal. Dengan terjadinya interaksi sosial di

dalamnya, lapak baca “Perpustakaan Jalanan Jakarta” dapat membangun *social capital* yang berupa rasa kebersamaan, kepercayaan, dan jembatan antar kelompok. Dengan begitu, perpustakaan bukan hanya sebagai agen penyedia koleksi, melainkan juga sebagai agen inklusi sosial yang bersifat informal yang dapat memperkuat literasi masyarakat marjinal di kawasan perkotaan, khususnya di kawasan Blok M, Jakarta.

2.1.5 Literasi Masyarakat Marjinal

2.1.5.1 Literasi

Literasi secara umum dipahami sebagai kemampuan baca tulis, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang tertentu, dan kemampuan individu dalam mengolah pengetahuan dan informasi untuk kebutuhan hidupnya (Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Selanjutnya, menurut *American Library Association* (ALA) (2000) literasi didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam mengenali sebuah informasi saat ia memerlukannya, serta kemampuan individu tersebut untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi tersebut dengan efektif. Sedangkan menurut UNESCO (2003) literasi dipahami sebagai kemampuan dalam mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, dan mengomunikasikan informasi dalam perkembangan dunia digital yang mudah berubah dan kaya akan teks.

Sedangkan Maulana (2015) memahami literasi sebagai kecakapan individu dalam memanfaatkan dan memahami teknologi komunikasi dan informasi, contohnya dalam mendukung pendidikan dan ekonomi. Irhamni et al. (2026) dalam penelitiannya mendefinisikan literasi sebagai kemampuan baca tulis dan kemampuan mengolah informasi dan pengetahuan yang digunakan untuk kecakapan hidup.

Namun, seiring perkembangan penelitian, literasi tidak lagi dipahami sebagai kemampuan baca dan tulis secara teknis. Konsep literasi berkembang menjadi praktik sosial yang terhubung dengan keseharian masyarakat, interaksi sosial, serta bagaimana individu memahami dan menggunakan informasi dalam lingkungannya.

Keefe dan Copeland (2011) memahami literasi sebagai praktik sosial yang muncul melalui interaksi, pertukaran informasi, dan aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, serta tidak lagi terpaku oleh kemampuan baca tulis, melainkan berkembang dalam bentuk komunikasi, hubungan sosial, dan praktik kehidupan individu dalam bermasyarakat. Dengan demikian, literasi memiliki peran dalam membangun partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Keefe dan Copeland (2011) mengembangkan konsep literasi menjadi lebih luas melalui lima prinsip utama, yaitu:

1. Setiap individu memiliki kemampuan untuk memperoleh literasi (*all people are capable of literacy*)
2. Literasi merupakan hak asasi manusia dan menjadi dasar pengalaman manusia (*literacy is a human right and a fundamental part of the human experience*)
3. Literasi bukan hanya kemampuan yang melekat pada individu, tetapi juga terbentuk melalui hubungan dan interaksi dengan orang lain (*literacy is not solely an individual trait but requires and creates relationships with others*)
4. Literasi mencakup proses komunikasi, interaksi, dan partisipasi sosial yang memungkinkan setiap individu untuk terlibat serta berpotensi menghasilkan

pemberdayaan (*literacy involves contact, communication, and empowerment*)

5. Literasi merupakan tanggung jawab kolektif masyarakat dalam membangun pemaknaan melalui berbagai bentuk komunikasi untuk menyampaikan dan menerima informasi (*literacy is a collective responsibility of communities*)

Berdasarkan berbagai pemahaman di atas, literasi tidak hanya dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis secara formal, tetapi juga sebagai praktik sosial yang berkembang melalui interaksi, komunikasi, dan pertukaran informasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penelitian ini, aktivitas seperti membaca bersama, diskusi informal, berbagi informasi, dan interaksi antar pengunjung di lapak baca “Perpustakaan Jalanan Jakarta” dipahami sebagai bentuk praktik literasi masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan akses informasi, partisipasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.5.2 Masyarakat Marjinal

Masyarakat marjinal merupakan sekelompok orang yang mengalami kondisi keterpinggirkan bukan hanya karena faktor ekonomi, melainkan juga karena adanya eksklusi informasi seperti miskin informasi, kerahasiaan, dan penipuan yang menyebabkan keterbatasan kemampuan dalam berpartisipasi penuh dalam masyarakat (Chatman, 1996). Widiputranti et al. (2005) mendefinisikan masyarakat marjinal sebagai kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap sumber

daya, informasi, dan pengambilan keputusan, yang berakibat pada keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan partisipasi dalam pembangunan.

Maulana et al. (2025) mendefinisikan masyarakat marjinal sebagai golongan masyarakat yang hidup dengan keterbatasan ekonomi, sosial, dan akses layanan publik, dan sering ditemukan tersisihkan dari proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Umayyah et al. (2025) mendefinisikan masyarakat marjinal sebagai golongan masyarakat yang merasakan keterbatasan dalam akses informasi khususnya media digital dan merasakan hambatan struktural dan sosial dalam memenuhi kebutuhan informasinya.

Masyarakat marjinal, khususnya masyarakat marjinal yang berada di daerah perkotaan, (*Urban Marginality*) merupakan kondisi ketika kelompok masyarakat berada dalam posisi pinggiran pada struktur sosial perkotaan yang diakibatkan oleh berbagai ketidaksetaraan yang saling berkaitan, Wacquant (1999). Wacquant (1999) memahami kemarjinalan bukan hanya sekadar kemiskinan ekonomi, tetapi mencakup keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak, layanan publik, pendidikan, informasi, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat yang rendah. Dalam konteks perkotaan modern, masyarakat marjinal umumnya berfokus pada sektor pekerjaan informal yang rentan, memiliki akses terhadap sumber daya, dan sering mengalami eksklusi sosial serta stigma dari masyarakat yang lebih dominan.

Berdasarkan sintesis berbagai pemikiran di atas, masyarakat marjinal dalam penelitian ini dipahami sebagai kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan

secara ekonomi, sosial, maupun informasi sehingga menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan dalam kehidupan bermasyarakat. Keterbatasan tersebut bukan hanya pada kondisi ekonomi, tetapi juga mencakup hambatan dalam memperoleh, menggunakan, dan memanfaatkan informasi serta keterbatasan akses terhadap layanan publik dan ruang sosial formal.

Merujuk pada pemikiran Wacquant (1999), Chatman (1996), Widiputranti et al. (2005), dan Umayyah et al. (2025), masyarakat marjinal dalam penelitian ini diidentifikasi melalui beberapa karakteristik, yaitu:

1. Memiliki keterlibatan dalam sektor ekonomi informal atau kondisi ekonomi rentan
2. Mengalami keterbatasan akses terhadap informasi dan sumber pengetahuan.
3. Mengalami hambatan sosial ataupun struktural dalam memenuhi kebutuhan informasi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
4. Berada dalam posisi sosial yang cenderung terpinggirkan dalam struktur masyarakat perkotaan.

Berdasarkan karakteristik tersebut, masyarakat marjinal pada penelitian ini merujuk pada pedagang kaki lima, anak penjual tisu, pekerja informal, serta kelompok masyarakat yang bergantung pada sektor ekonomi informal di kawasan Blok M.

2.1.5.3 Literasi Masyarakat Marjinal

Pada hasil penelitian milik Parawati (2025), literasi masyarakat marjinal disimpulkan sebagai keadaan suatu kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan, minat, dan

motivasi belajar yang rendah, keterbatasan dalam akses pendidikan dan informasi, serta diikuti dengan keadaan perekonomian yang cenderung miskin, berfokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Fatimah et al. (2022) dalam hasil penelitiannya, disimpulkan bahwa literasi masyarakat marjinal merupakan suatu permasalahan yang dirasakan oleh kelompok masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan, seperti putus sekolah, rendahnya literasi, minat baca dan tulis, yang disebabkan karena faktor ekonomi yang rendah, faktor geologis dan mata pencaharian masyarakat lingkungan sekitar.

Melalui penelitian milik Ananda et al. (2025) literasi masyarakat marjinal dipahami sebagai sebuah hambatan yang dirasakan oleh masyarakat marjinal (seperti buruh, penghuni pemukiman kumuh, ataupun masyarakat yang keterbatasan dalam sumberdaya dan ekonomi) yaitu keterbatasan dalam mengakses informasi, rendahnya literasi digital, tidak mempunyai perangkat yang memadai untuk mengakses informasi, serta minimnya sumber informasi yang terpercaya.

Dapat disimpulkan dari berbagai pemahaman di atas bahwa literasi masyarakat marjinal tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, memanfaatkan, dan bertukar informasi melalui berbagai bentuk interaksi sosial. Literasi masyarakat marjinal sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan sosial, ekonomi, dan akses terhadap sumber informasi sehingga membatasi partisipasi mereka dalam memperoleh pengetahuan dan meningkatkan kualitas hidup.

Dalam konteks penelitian ini, literasi masyarakat marjinal merujuk pada praktik memperoleh dan berbagi informasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat seperti pedagang kaki lima, anak penjual tisu, dan pekerja informal di kawasan Blok M melalui aktivitas membaca, diskusi, pertukaran informasi, serta interaksi sosial yang berlangsung di lapak baca “Perpustakaan Jalanan Jakarta”.

Oleh karena itu, kehadiran ruang literasi yang terbuka dan mudah diakses menjadi penting dalam membantu masyarakat marjinal memperoleh informasi, membangun relasi sosial, memperluas kesempatan belajar, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif Keefe dan Copeland (2011), aktivitas membaca bersama, diskusi, berbagi pengalaman, dan pertukaran informasi yang berlangsung di lapak baca dapat dipahami sebagai bentuk praktik literasi sosial yang berpotensi mendorong pemberdayaan masyarakat.

2.2 Penelitian Sejenis Sebelumnya

Bagian ini berisi tinjauan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, diharapkan menambah wawasan penulis dan sebagai bukti orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bukan hasil plagiasi.

Penelitian sejenis yang pertama berjudul “*Cultivating Inclusive Public Space with Urban Gardens*” milik Murphy et al. (2022) pada jurnal *Local environment*, dengan topik bagaimana praktik urban gardening (UG) sebagai bentuk implementasi ruang publik inklusif berkontribusi terhadap inklusivitas ruang publik. Penelitian milik Murphy et al. (2022) menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, wawancara, observasi dan analisis dokumen. Pada penelitian ini Murphy

et al. (2022) menggunakan teori produksi ruang oleh warga milik Lefebvre. Penelitian ini menemukan bahwa dengan adanya taman kota mendorong aktivitas dan partisipasi lintas kelompok dalam masyarakat dari berbagai latar belakang, yang membuat masyarakat merasa diterima dan berdaya. Hal ini menjadikan taman kota bukan hanya sekedar tempat fisik tetapi juga menjadi ruang sosial alternatif tanpa adanya dominasi dari komersial dan birokrasi.

Penelitian milik Murphy et al. (2022) memiliki kesamaan dengan penelitian milik penulis yaitu, fokus penelitian yang sama-sama mengkaji bagaimana ruang publik inklusif berperan sebagai wadah partisipasi sosial masyarakat, walaupun bentuknya berbeda, taman kota dengan perpustakaan jalanan tetapi sama-sama menjadi sarana yang mendorong adanya interaksi antar kelompok sosial dan memberdayakan masyarakat terpinggirkan. Selain itu, keduanya juga menyoroti pentingnya dimensi sosial dan kultural pada ruang publik bukan hanya sekedar fungsi fisiknya.

Penelitian sejenis yang kedua berjudul “Peran Ruang Publik Perkotaan dalam Mendorong Budaya Politik Inklusif di Kota Makassar” milik Ersina (2025) pada jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur. Penelitian milik Ersina (2025) menggunakan teori ruang publik milik Habermas (2010) dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi (terhadap taman, alun-alun, pedestrian), wawancara, dan analisis data. Hasil penelitian milik Ersina (2025) mengungkapkan bahwa ruang publik di Makassar mampu menciptakan ruang terbuka, aman, dan mudah untuk diakses seluruh kalangan masyarakat termasuk perempuan dan pemuda. Ruang publik di kota Makassar dimanfaatkan masyarakat untuk berdiskusi dan

menyampaikan aspirasi mereka, hal ini membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap politik. Kota Makassar sukses menciptakan ruang publik inklusif tak luput dengan adanya dukungan dari pemerintah dengan menyediakan fasilitas dan regulasi.

Terdapat kesamaan antara penelitian milik Ersina (2025) dan penulis yaitu, aspek peran ruang publik sebagai sarana partisipasi dan kesetaraan akses. Kedua penelitian ini sama-sama menekankan pentingnya partisipasi pemerintah sebagai pengelola ruang dalam menciptakan regulasi dan fasilitas yang mendukung inklusivitas di ruang publik. Dalam konteks penelitian milik peneliti, perpustakaan jalanan sebagai ruang publik yang berfungsi sebagai wahana masyarakat, khususnya masyarakat marjinal dalam mendapatkan akses informasi, menyampaikan aspirasi, dan memperkuat kesadaran sosial.

Penelitian sejenis yang ketiga berjudul *“The Contribution of Streets Libraries in Australia to Literacy, Community and the Gift Economy”* milik Chen (2022) pada *Journal of the Australian Library and Information Association*, dengan topik penelitian bagaimana kontribusi perpustakaan jalanan terhadap literasi masyarakat, pembentukan komunitas dan ekonomi hadiah. Penelitian milik Chen menggunakan metode penelitian *Mix Methods* dengan melakukan diskusi kelompok terfokus dengan pustakawan jalanan dan menyebar kuesioner kepada 502 responden. Pada penelitian ini menggunakan teori *gift economy* milik Mauss & Cheal. Hasil penelitian milik Chen (2022) menemukan bahwa perpustakaan jalanan di Australia kebanyakan berada di kawasan elit atau berada di wilayah dengan status sosial ekonomi tinggi, sehingga

kurang efektif dalam menjangkau "*Book Deserts*" atau di mana suatu wilayah atau komunitas sulit mengakses buku dan bahan bacaan lainnya. Chen (2022) mengungkapkan bahwa perpustakaan jalanan masih minim berdampak pada literasi masyarakat, namun memberikan dampak positif pada pengembangan modal sosial local masyarakat.

Persamaan pada penelitian milik penulis berupa sama-sama menyoroti perpustakaan jalan sebagai sarana pembentukan modal sosial serta penguatan hubungan sosial masyarakat. Tetapi, penelitian milik Chen (2022) fokus penelitiannya ada pada negara maju dengan persoalan pemerataan lokasi perpustakaan (*Book Deserts*), sedangkan penelitian milik penulis berfokus pada perpustakaan jalanan yang berada di tengah kota padat penduduk (Blok M) yang melayani masyarakat marginal perkotaan.

Penelitian sejenis yang keempat merupakan milik Hasanah (2020) dengan judul "*Strategy for Empowering Literature Community of Dolok Still Through Street Library During The Covid-19 Pandemic*" pada *International Journal of Cultural and Social Science*, dengan topik penelitian perpustakaan jalanan sebagai bentuk inisiatif untuk meningkatkan minat baca masyarakat, menumbuhkan budaya literasi serta mengatasi keterbatasan akses informasi pada masa pandemi. Teori yang digunakan oleh Hasanah (2020) adalah Strategi Komunikasi milik Ruslan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam oleh pendiri perpustakaan jalanan, observasi lapangan dan analisis naratif. Hasanah (2020) menemukan hasil dalam penelitian berupa perpustakaan jalanan mendapatkan dan

memberikan respon positif dari masyarakat, perpustakaan jalanan menjadi alternatif inklusif bagi masyarakat Dolok Masihul dalam mengakses informasi dan bahan bacaan di tengah kawasan yang minim fasilitas membaca, minat baca rendah, minimnya antusias. Perpustakaan jalanan berdampak positif ditandai dengan antusias yang datang dari anak-anak yang mulai rutin untuk meminjam dan membaca buku.

Persamaan penelitian milik Hasanah (2020) dan Penulis ada pada perpustakaan jalanan sebagai alternatif inklusif untuk memperlebar akses informasi dan literasi. Namun, penelitian milik Hasanah (2020) berfokus pada bagaimana strategi komunikasi di masa pandemi, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada fungsi sosial perpustakaan jalanan dalam membangun inklusi sosial serta akses informasi bagi masyarakat marjinal dengan teori *Meeting Places* milik Aabo & Audunson (2012).

Penelitian sejenis kelima merupakan penelitian milik Irwansyah & Halim (2024) dengan judul “*Pasar Rebo Street Library Community Alternative Education Empowerment Model for School Out-of-School Children*” pada *International Journal of Education and Social Science*. Penelitian ini berfokus pada topik bagaimana peran perpustakaan jalanan sebagai sarana pendidikan nonformal bagi anak-anak putus sekolah dan anak jalanan di kawasan Jakarta Timur dengan model pemberdayaan pendidikan alternatif yang dilaksanakan oleh komunitas *Pasar Rebo Street Library*. Penelitian milik Irwansyah dan Halim menggunakan teori pendidikan kritis milik Paulo Freire sebagai teori yang melandasi penelitian mereka. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam dengan pendiri dan relawan komunitas, observasi

partisipatif, dan dokumentasi. Irwansyah dan Halim mendapatkan hasil penelitian berupa komunitas *Pasar Rebo Street Library* sukses menjadi ruang belajar inklusif di ruang publik seperti trotoar, taman, dan kolong jembatan, yang mewadahi anak-anak jalanan yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap pendidikan formal, keterbatasan sumber daya, dan stigma sosial menjadi minat dalam belajar, membaca, dan berinteraksi secara sosial positif. Model pendidikan yang diterapkan oleh *Pasar Rebo Street Library* bersifat fleksibel, berbasis dengan kebutuhan anak-anak, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan.

Persamaan pada penelitian milik Irwansyah & Halim (2024) dengan milik penulis adalah sama-sama meneliti peran perpustakaan jalanan sebagai ruang pembelajaran bagi masyarakat terpinggirkan. Tetapi, pada penelitian milik Irwansyah & Halim (2024) berfokus pada fungsi pendidikan alternatif, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran perpustakaan jalanan sebagai *low-intensive meeting place* yang dapat membangun social capital yang memperkual inklusi sosial masyarakat marjinal perkotaan.

Penelitian sejenis yang selanjutnya berjudul “Peran Perpustakaan Jalanan Semarang Terhadap Pemberdayaan Masyarakat” milik Lestari & Subekti (2019) pada Jurnal Ilmu Perpustakaan. pada penelitiannya, Lestari & Subekti menggunakan teori milik Soetarno (2006) yang menjelaskan bahwa perpustakaan sebagai agen perubahan, pendidikan nonformal, dan pusat informasi bagi masyarakat. Dengan topik penelitian yang berfokus mengkaji bagaimana peran Perpustakaan Jalanan Semarang (Perjal) dalam memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan minat baca, menyediakan

informasi, dan aktivitas sosial yang berbasis literasi di sekitar taman Pandanaran, Semarang. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling, pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data dengan model Miles & Huberman. Pada hasil penelitian milik Lestari & Subekti (2019) menerangkan peran Perpustakaan Jalanan Semarang dalam menumbuhkan minat baca, menyediakan informasi, pendampingan belajar, kegiatan sosial hingga kontrol informasi berupa menyediakan koleksi buku, majalah, informasi terkait lowongan kerja, isu sosial gratis dengan suasana santai dan terbuka, pengarahan dan pemilihan koleksi sesuai usia, hingga melaksanakan bakti sosial dan donasi.

Terdapat Persamaan pada penelitian Putra et al. dengan milik penulis, yaitu kedua penelitian sama-sama fokus pada fungsi sosial perpustakaan jalanan sebagai ruang pemberdayaan publik dan penyedia informasi. Namun penelitian milik penulis akan mengkaji lebih jauh tentang dimensi inklusi sosial melalui teori Social Capital & Meeting Places di mana perpustakaan jalanan berperan sebagai ruang interaksi sosial yang membangun jembatan antar kelompok.

Berdasarkan kajian dari sejumlah penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar studi tentang ruang publik inklusif, baik melalui taman kota atau ruang terbuka perkotaan, menekankan pada pentingnya ruang yang mewadahi partisipasi sosial, keterbukaan akses, dan pemberdayaan masyarakat non diskriminatif. Namun dalam fokus penelitian perpustakaan jalanan, perhatian sebagai ruang sosial

yang membangun modal sosial serta menjembatani kesenjangan sosial antar kelompok masih tergolong minim.

Sebagian besar studi sebelumnya lebih menekankan pada peran literasi dan pemberdayaan masyarakat, namun masih terdapat kekurangan dalam menghubungkan fungsi perpustakaan jalanan dengan konsep *Library as Low-Intensive Meeting Place* (Aabø & Audunson, 2012) guna menjelaskan dimensi sosialnya. Untuk mengatasi celah tersebut, penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan dengan menganalisis lapak baca “Perpustakaan Jalanan Jakarta” di kawasan Blok M sebagai wujud ruang publik yang inklusif, yang memfasilitasi akses informasi, memperkuat interaksi sosial antar kelompok sosial, serta membentuk modal sosial sebagai sarana penghubung antar komunitas.

Konsep *Library as Low-Intensive Meeting Place* dari Aabø & Audunson (2012) digunakan sebagai teori penghubung untuk menjelaskan bagaimana ruang publik inklusif beroperasi secara konkret dalam bentuk perpustakaan jalanan, yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial informal dan akses literasi bagi masyarakat marjinal.

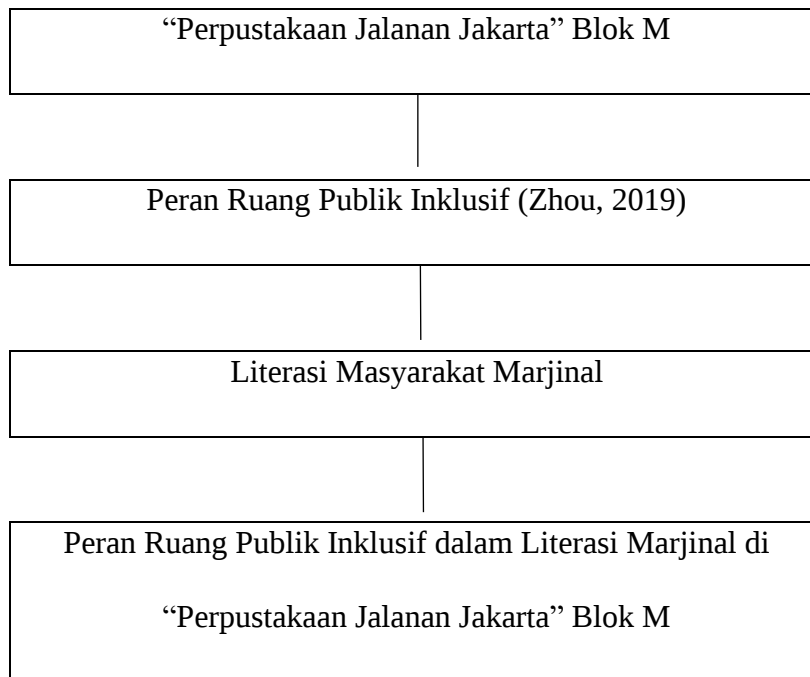
Dengan menerapkan teori *Library as Low-Intensive Meeting Place*, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dalam disiplin Ilmu Perpustakaan dan Informasi (LIS) mengenai kontribusi perpustakaan komunitas informal sebagai instrumen keterlibatan sosial dan distribusi informasi di tengah masyarakat perkotaan yang heterogen. Melalui pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur terkait literasi dan pemberdayaan, tetapi juga memberikan kontribusi inovatif

terhadap kajian inklusi sosial serta pengembangan ruang publik yang berorientasi komunitas di Indonesia.

2.3 Kerangka Pikir

Untuk memperjelas arah dan fokus penelitian, kerangka pikir berikut disusun guna menggambarkan proses berpikir peneliti dalam menghubungkan fenomena di lapangan dengan teori yang relevan serta metode analisis yang digunakan.

Bagan 2.3 Kerangka Pikir



Kerangka pikir penelitian ini menjelaskan hubungan antara variabel utama, yaitu lapak baca “Perpustakaan Jalanan Jakarta” Blok M, literasi masyarakat marjinal, dan peran ruang publik inklusif. Hubungan variabel di atas dibangun untuk menelusuri bagaimana lapak baca “Perpustakaan Jalanan Jakarta” berfungsi sebagai ruang publik

inklusif yang dapat meningkatkan literasi masyarakat, khususnya bagi masyarakat marjinal di Jakarta Blok M. Lapak baca “Perpustakaan Jalanan Jakarta” menjadi titik awal dalam kerangka ini karena berperan sebagai ruang publik nonformal yang menyediakan akses terhadap informasi dan kegiatan literasi bagi semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat marjinal. Kehadiran perpustakaan jalanan merupakan bentuk respon terhadap keterbatasan akses pendidikan dan informasi, sekaligus sarana untuk menumbuhkan kesadaran kritis, memperkuat partisipasi sosial, serta meneguhkan solidaritas antar warga. Melalui kegiatan tersebut, terbentuklah proses penguatan literasi masyarakat, yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga pada kemampuan memahami dan memanfaatkan informasi untuk pengembangan diri dan komunitas.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep **peran ruang publik inklusif menurut Zhou (2019)**, yang memandang ruang publik inklusif sebagai ruang yang mampu memberikan rasa aman, diterima, dan dihargai bagi seluruh pengguna tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya. Zhou (2019) menekankan bahwa ruang publik inklusif memiliki peran penting dalam menjamin inklusi sosial, khususnya bagi kelompok masyarakat marjinal yang tidak memiliki akses terhadap ruang komersial dan institusi formal. Dalam konteks ini, lapak baca “Perpustakaan Jalanan Jakarta” Blok M dipahami sebagai ruang publik inklusif yang memungkinkan masyarakat marjinal untuk hadir, berkumpul, belajar, dan mengekspresikan diri secara setara.

Dengan demikian, keseluruhan kerangka pikir penelitian ini bermuara pada upaya untuk memahami **peran ruang publik inklusif dalam mendukung dan memperkuat literasi masyarakat marjinal di lapak baca “Perpustakaan Jalanan Jakarta” Blok M.** Melalui kerangka ini, penelitian berupaya menunjukkan bahwa perpustakaan jalanan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai ruang publik inklusif yang berperan dalam pemberdayaan sosial dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat marjinal di ruang perkotaan.